

DAFTAR PUSTAKA

- Arend Lijphart, *Patterns of Democracy : Government Forms and Performance in Thirty-Six Countries*, (London: Yale University Press, 2012), hlm. 40
- Arifin, Yusuf Rachmat, and Sapto Hermawan. "DILEMATIKA KEBIJAKAN KETENAGALISTRIKAN DALAM USAHA PENYEDIAAN TENAGA LISTRIK DI INDONESIA." *Jurnal Ius Constituendum* 6, no. 2 (2021): 1–31.
- Auli, R. C. (2025, 23 Mei). Hak-hak karyawan kontrak menurut UU Cipta Kerja. Hukumonline. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/hak-hak-karyawan-kontrak-lt65974d826e0f9/>
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. (2001). *Kamus besar bahasa Indonesia* (hal. 674). Balai Pustaka.
- Edi Suharto, *Kebijakan Sosial: Perlindungan dan Pemberdayaan Sosial dalam Kesejahteraan Sosial*, (Bandung: Alfabeta, 2013), 134.
- Faisal Santiago, *Negara Hukum dan Perlindungan Hak Asasi Manusia* (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2020), 88.
- Fakultas Hukum Universitas Indonesia. (2008). *Buku ajar hukum perburuhan*. Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Fanani, F., di Kalangan Kaum, A. F. R., Hadhi, M., Argama, R., Rishanty, S., & Hidayat, T. A. H. (2000). *Peradilan agama dalam politik hukum di Indonesia*. PT Raja Grafindo Persada.
- Gunawan, Asep Rudi, Ade Maman Suherman, and Tri Setiady. "Kepastian Hukum Terhadap Tenaga Kerja PKWT Yang Dipekerjakan Kembali Setelah 5 Tahun Masa Kontrak Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021." *Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis* 5, no. 5 (2024): 1–19
- Gunawan, Asep Rudi, Ade Maman Suherman, and Tri Setiady. "Kepastian Hukum Terhadap Tenaga Kerja PKWT Yang Dipekerjakan Kembali Setelah 5 Tahun Masa Kontrak Berdasarkan Peraturan Pemerintah

- Nomor 35 Tahun 2021." *Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis* 5, no. 5 (2024): 1–19.
- Guy Davidov, *A Purposive Approach to Labour Law* (Oxford: Oxford University Press, 2016), 30.
- Hadjon, Philipus M. 1987. *Perlindungan hukum bagi rakyat di Indonesia*. Bina Ilmu.
- Hafid Abbas, *Keadilan Sosial dalam Dunia Kerja*, (Jakarta: Kompas, 2012), 89
- Herlien Budiono, *Asas Keseimbangan bagi Hukum Perjanjian Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006), 221.
- Herlien Budiono, *Asas Keseimbangan bagi Hukum Perjanjian Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006), 223.
- Indonesia, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perpu Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Lembaran Negara Tahun 2023 Nomor 6
- Indonesia, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang Undang, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6.
- Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 131.
- International Labour Organization, *Discrimination (Employment and Occupation) Convention*, 1958 (No. 111), www.ilo.org.
- Irwansyah. (2022). *Penelitian hukum*. Mira Buana Media.
- Ismail, N., & Zainuddin, M. (2018). *Hukum dan Fenomena Ketenagakerjaan. Focus: Jurnal Pekerjaan Sosial*, 1(3), 166-182.
- John Rawls, *A Theory of Justice*, (Cambridge: Harvard University Press, 1971), 302.

- Khakim, A. (2003). Pengantar hukum ketenagakerjaan Indonesia berdasarkan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003. PT. Citra Aditya Bakti.
- Kristiana, Socia Prihawantoro, and Joko Santosa. "PENGARUH SEKTOR KETENAGALISTRIKAN TERHADAP PEREKONOMIAN NASIONAL : ANALISIS INPUT-OUTPUT." *Jurnal Energi Dan Lingkungan* 16, no. 1 (2020): 9–16.
- Kristiantono, Petrus, and Yuliawati. "Dampak Perubahan Struktur Ekonomi Terhadap Tingkat Kesejahteraan Petani Dan Tenaga Kerja Sektor Pertanian." *Jurnal Sosial Ekonomi Pertanian* 18, no. 2 (2022): 141–58.
- Kurniawan, N. I. (2009). *Globalisasi & negara kesejahteraan: perspektif institusionalisme*.
- Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia, (Jakarta: CV Sinar Bakti, 1983), 215.
- Kusuma, Ahmad Jaya, Edith Ratna M.S, and Irawati Irawati. "Kedudukan Hukum Pekerja Pkwt Yang Tidak Sesuai Dengan Ketentuan Undang-Undang Ketenagakerjaan." *Notarius* 13, no. 1 (2020): 193–208. <https://doi.org/10.14710/nts.v13i1.30324>.
- Kusuma, Ahmad Jaya, Edith Ratna M.S, and Irawati Irawati. "Kedudukan Hukum Pekerja Pkwt Yang Tidak Sesuai Dengan Ketentuan Undang-Undang Ketenagakerjaan." *Notarius* 13, no. 1 (2020): 193–208. <https://doi.org/10.14710/nts.v13i1.30324>.
- Lotulung, P. E. (1993). *Beberapa sistem tentang kontrol segi hukum terhadap pemerintah*. Citra Aditya Bakti.
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, *Putusan Nomor 168/PUU-XXI/2023*, tentang Pengujian UU Cipta Kerja terhadap UUD 1945.
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Putusan Nomor 27/PUU-IX/2011 dan Putusan Nomor 168/PUU-XXI/2023, www.mkri.id.
- Makadolang, Equino Mikael, Ronny Adrie Maramis, and Lendy Siar. "Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Pada Perjanjian Kerja Waktu

- Tertentu (PKWT) Yang Diberhentikan Sebelum Waktunya.” *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi Lex Privatum* 13, no. 3 (2024).
- Makadolang, Equino Mikael, Ronny Adrie Maramis, and Lendy Siar. “Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Pada Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) Yang Diberhentikan Sebelum Waktunya.” *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi Lex Privatum* 13, no. 3 (2024).
- Malayu S.P. Hasibuan, **Manajemen Sumber Daya Manusia** (Jakarta: Bumi Aksara, 2019), 134
- Muchsan, Peranan Pemerintah dalam Perlindungan Hukum terhadap Buruh dalam Negara Kesejahteraan, (Yogyakarta: Liberty, 2005), 87
- Muchsin. (2003). Perlindungan dan kepastian hukum bagi investor di Indonesia. Surakarta: Muhammadiyah University Press.
- Munaf, Y. (2016). *Hukum administrasi negara*. Marpoyan Tujuh.
- Nasution, M. S., Suhaidi, S., & Marzuki, M. (2021). Akibat Hukum Perjanjian Kerja Secara Lisan Menurut Perspektif Hukum Ketenagakerjaan. *Jurnal Ilmiah METADATA*, 3(2), 415-431.
- Noor, Muhammad. “Penerapan Prinsip-Prinsip Hukum Perikatan Dalam Pembuatan Kontrak.” *Jurnal Majahib* 14, no. 1 (2015).
- Noor, Muhammad. “Penerapan Prinsip-Prinsip Hukum Perikatan Dalam Pembuatan Kontrak.” *Jurnal Majahib* 14, no. 1 (2015).
- Novelia, Vini, and Suyatno. “KERANGKA HUKUM UNTUK KERJASAMA PUBLIK-SWASTA (PPP) DALAM SEKTOR ENERGI : PERSPEKTIF INDONESIA.” *JICN: Jurnal Intelek Dan Cendikiawan Nusantara* 1, no. 2 (2024): 1751–59.
- Panggabean, Hetty. (2018). Perlindungan hukum praktik klinik kebidanan. Budi Utama.

- Paul C. Weiler, *Governing the Workplace: The Future of Labor and Employment Law*, (Cambridge: Harvard University Press, 1990), 78.
- Paul C. Weiler, *Governing the Workplace: The Future of Labor and Employment Law*, (Cambridge: Harvard University Press, 1990), 44.
- Payaman J. Simanjuntak, *Ekonomi Ketenagakerjaan dan Hubungan Industrial* (Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi UI, 2004), 144.
- Payaman J. Simanjuntak, *Pengantar Ekonomi Ketenagakerjaan*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2011), 147.
- Payaman Simanjuntak, *Pengantar Ekonomi Tenaga Kerja* (Jakarta: Lembaga Penerbit FE UI, 2004), 145.
- Philippe Nonet and Philip Selznick, **Law and Society in Transition: Toward Responsive Law** (New York: Harper & Row, 1978), 16–19.
- Prinst, D. (2000). *Hukum ketenagakerjaan Indonesia*. PT. Citra Aditya Bakti.
- Prodjodikoro, W. (1991). *Asas-asas hukum perdata*. Sumur Bandung.
- Rajagukguk, Erman. 1997. Peranan hukum dalam pembangunan pada era globalisasi: Implikasi bagi pendidikan hukum di Indonesia. Pidato Pengukuhan Guru Besar, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta.
- Richard Mitchell, "Regulatory Perspectives on Labour Law," *Australian Journal of Labour Law* 17, no. 1 (2004): 38–56
- Richard Mitchell, "Regulatory Perspectives on Labour Law," *Australian Journal of Labour Law* 17, no. 1 (2004): 45.
- Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Masyarakat*, (Bandung: Angkasa, 1980), 58.
- Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Masyarakat*, (Bandung: Angkasa, 1980), 58.
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000), 124
- Sembiring, S. (2005). *Himpunan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia tentang ketenagakerjaan*. CV Nuansa Aulia.
- Setiono. (2004). *Rule of law (supremasi hukum)*. Surakarta: Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum, Universitas Sebelas Maret.

- Shalihah, Fithriatus. "Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (Pkw) Dalam Hubungan Kerja Menurut Hukum Ketenagakerjaan Indonesia Dalam Perspektif Ham." *UIR Law Review* 01, no. 2 (2017): 153
- Shalihah, Fithriatus. "Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (Pkw) Dalam Hubungan Kerja Menurut Hukum Ketenagakerjaan Indonesia Dalam Perspektif Ham." *UIR Law Review* 01, no. 2 (2017): 153.
- Situmorang, V. M., & Juhir, J. (1994). *Aspek hukum pengawasan melekat dalam lingkungan aparatur pemerintah*. PT. Rineka Cipta.
- Soekanto, Soerjono. (1988). *Efektivitas hukum dan pengaturan sanksi*. Ramadja Karya.
- Soepomo, Hukum Perburuhan Bidang Hubungan Kerja, (Jakarta: Djambatan, 1986), 77
- Sri Lestari Pujilestari Soegondo, Hukum Ketenagakerjaan Indonesia, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2014), 142.
- Sri Redjeki Hartono, Hukum Perburuhan Indonesia, (Yogyakarta: FH UGM, 1991), 112.
- Subekti, Pokok-Pokok Hukum Perdata, (Jakarta: Intermasa, 2008), 13
- Subekti, Pokok-Pokok Hukum Perdata, (Jakarta: Intermasa, 2008), 10.
- Sudikno Mertokusumo, Hukum Perjanjian Indonesia, (Yogyakarta: Liberty, 2001), 92.
- Sulistyowati Irianto, "Keadilan dalam Hubungan Industrial: Perspektif Gender dan Pancasila," *Jurnal Hukum IUS*, Vol. 5, No. 2 (2017): 167–178.
- Syarwi, P. (2022). Diskursus Teori dan Praktik Model Demokrasi Konsensus di Indonesia. *Communitarian: Jurnal Prodi Ilmu Politik*, 3(2).
- Thea DA, A. (2023, 28 Agustus). UU Cipta Kerja benahi 6 ketentuan bidang ketenagakerjaan. Hukumonline.
<https://www.hukumonline.com/berita/a/uu-cipta-kerja-benahi-6-ketentuan-bidang-ketenagakerjaan-lt64ebfaba48078>

- Theresia Anita Christiani, "Negara Kesejahteraan dalam Perspektif Hukum,"
Jurnal Hukum dan Pembangunan 48, no. 1 (2018): 110–123.
- Tjipto Raharjo, **Hubungan Industrial Pancasila** (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1996), 28
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perppu Cipta Kerja
Menjadi Undang-Undang, Pasal 81 angka 27.
- Usman, Sabian. (2009). *Dasar-dasar sosiologi*. Pustaka Belajar.
- Wijayanti, A. (2009). *Hukum ketenagakerjaan pasca reformasi*. Sinar Grafika.
- Yosef Djakababa, *Omnibus Law: Sebuah Strategi Hukum dalam
Penyederhanaan Regulasi* (Jakarta: Pusat Studi Hukum Nasional,
2020), 13